

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi mengubah pola interaksi manusia. Internet menjadi dasar bagi media sosial yang menghubungkan miliaran orang tanpa batas. Pada Januari 2021, tercatat 4,66 miliar pengguna internet aktif, 4,32 miliar pengguna seluler dan 4,2 miliar pengguna aktif media sosial (Abdillah, 2022). Media sosial sebagai ruang utama untuk berkomunikasi dan mengakses informasi secara cepat dan interaktif. Media sosial berbeda dari media tradisional karena kontennya dipersonalisasi oleh algoritma dan paparan informasi politik sering terjadi tanpa sengaja, sehingga dapat memengaruhi keterlibatan serta kebutuhan informasi politik (Andersen et al., 2021, p. 100).

Riset Polling Indonesia dan APJII mengemukakan jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 171,17 juta jiwa atau 64,8% dari populasi. Tingginya penetrasi ini menunjukkan pesatnya perkembangan teknologi sekaligus perubahan budaya bermedia, di mana masyarakat mulai menyesuaikan diri dengan perangkat dan kebiasaan digital yang akhirnya memengaruhi komunikasi, interaksi sosial, dan gaya hidup (APJII, 2025).

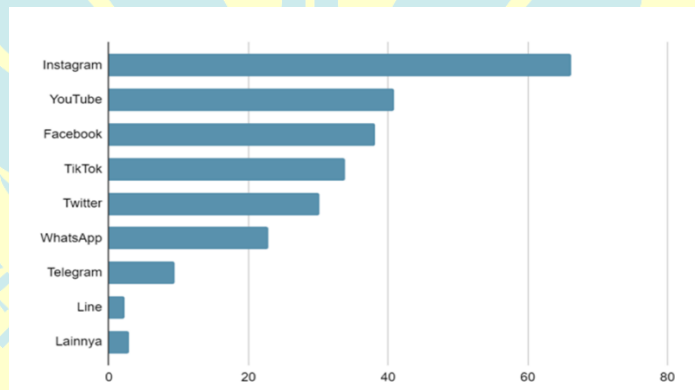
Media sosial memberikan pengaruh signifikan terhadap minat kunjungan, dengan kontribusi sebesar 45,7%, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor eksternal lainnya. Temuan ini menegaskan bahwa keterpaparan terhadap media, khususnya

media sosial, memiliki peran penting dalam membentuk minat audiens, meskipun faktor-faktor lain di luar media juga tetap berpengaruh (Salwa Irlana et al., 2025).

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa Gen Z saat mengakses informasi politik di media sosial sering tidak mencarinya secara sengaja, melainkan menemukannya secara tidak sengaja karena konten politik muncul di beranda/algorithm saat mereka sedang scroll konten hiburan atau aktivitas lain (Andersen et al., 2021, p. 100).

Gambar 1. 1.

Sebaran Media Sosial Mengakses Informasi Politik



Sumber: Databooks, 2024

Hasil data yang dipublikasikan oleh Databooks terkait proporsi penggunaan media sosial oleh kalangan muda sebagai sarana memperoleh informasi politik. Temuan tersebut, Instagram menempati posisi teratas dengan persentase pengguna sebesar 66,2%, disusul oleh YouTube dengan 40,8%. Survei ini melibatkan 1.005 responden yang seluruhnya memiliki nomor telepon seluler dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kelompok usia, mayoritas responden termasuk dalam kategori Gen

Z berusia 17–26 tahun (50,4%) dan kelompok milenial berusia 27–42 tahun (49,6%) (Databooks, 2024).

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi, termasuk isu politik dan kebijakan publik. (Fazilla, 2025). Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda menjadi audiens aktif yang mengikuti dinamika politik melalui berbagai platform media (Hanifah Nurul, 2024). Arus informasi digital yang cepat dan masif tersebut, penting untuk memperhatikan kualitas informasi yang diterima audiens. Media sosial sebagai bentuk komunikasi yang sangat luas jangkauannya dan melampaui batas ruang-waktu membuat penyebaran kampanye dapat terjadi cepat dan massif (Putri et al., 2020).

Penggunaan Instagram meningkat menjadikan salah satu sebagai sumber informasi, muncul figur influencer seperti Jerome Polin yang tidak hanya dikenal melalui konten edukatif, tetapi juga aktif menyuarakan berbagai isu sosial dan politik. Ia merupakan salah satu pendiri Malaka Project yang berfokus pada pembahasan isu politik, pendidikan, kemanusiaan, serta persoalan kebangsaan, dan turut menjadi salah satu pihak yang menginisiasi Gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat”. Konsistensi dalam menyajikan informasi yang relevan dan mudah dipahami membuat akun @jeromepolin memiliki tingkat kepercayaan serta keterlibatan audiens yang tinggi, khususnya di kalangan mahasiswa. Momentum kampanye tersebut, unggahan yang dibagikannya memperoleh perhatian, sehingga fenomena ini menjadi dasar pertimbangan penulis dalam menentukan objek penelitian.

Gambar 1. 2

Profil akun Instagram @jeromepolin



Karakteristik audiensnya yang didominasi oleh kalangan pelajar dan mahasiswa juga relevan dengan subjek penelitian, sehingga unggahan terkait kampanye “17+8 Tuntutan Rakyat” memiliki potensi kuat dalam memengaruhi kebutuhan informasi politik mahasiswa, yang pada akhirnya menjadi dasar utama peneliti dalam menentukan akun tersebut sebagai objek penelitian.

Tabel 1. 1

Jumlah Followers dan Likers @Jeromepolin dan akun instagram Sejenisnya

Akun Instagram	Followers	Likes
jeromepolin	9.6 juta	2.7 juta
irwandiferry	4,6 juta	182k
Salsaer	2 Juta	172k
andovidalopez	1.5 juta	166k
abigaillimuria	315.000	44,8k

Sumber: [Instagram.com/@jeromepolin](https://www.instagram.com/@jeromepolin), [instagram.com/@irwandiferry](https://www.instagram.com/@irwandiferry) ,
[instagram.com/@Salsaer](https://www.instagram.com/@Salsaer) , [instagram.com/@andovidalopez](https://www.instagram.com/@andovidalopez) ,
[instagram.com/@abigaillimuria](https://www.instagram.com/@abigaillimuria)

Tabel di atas menunjukkan perbandingan jumlah followers dan likes akun Instagram @jeromepolin dengan beberapa akun sejenis yang turut membahas isu sosial dan politik. Berdasarkan data tersebut, @jeromepolin memiliki jumlah pengikut paling tinggi, yaitu 9,6 juta followers, dengan perolehan likes mencapai 2,7 juta, angka yang secara signifikan melampaui akun lainnya. Sementara itu, akun seperti @irwandiferry, @salsaer, dan @andovidalpez memiliki jumlah pengikut yang lebih rendah, dengan tingkat perolehan likes yang juga berada jauh di bawah @jeromepolin. Perbedaan ini menunjukkan bahwa @jeromepolin memiliki tingkat *exposure* dan *engagement* yang paling besar, sehingga memiliki potensi pengaruh yang lebih kuat terhadap audiens dibandingkan akun-akun sejenis lainnya.

Gambar 1. 3.

Isi 17+8 Tuntutan Rakyat

17+8 TUNTUTAN RAKYAT
Transparansi. Reformasi. Empati.

Hasil rangkuman beberapa tuntutan yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir

17+8 Tuntutan Rakyat DEADLINE: 5 SEPT

- Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amrudin, maupun semua korban kekerasan dari pengorganisasian 17+8 dan aparat security selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
- Bentuk seluruh demonstrasi yang dilakukan oleh peserta tidak ada kriminalisasi demonstrasi.
- Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan pemerasan yang memerasakan dan memusuhi rakyat.
- Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan tentara SOP pengendalian massa yang sudah berlalu.
- Bekukan kamakan gaji/tunjangan anggota DPR dan beasiswa fasilitas baru. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, beasiswa DPR).
- Publikasikan daftar internet apa anggota 17+8 tidak mengendaki fungsi DPR.
- Umunkan komitmen partai untuk berpolitik pada rakyat di tengah krisis.
- Reformasi DPR harus melibatkan dan diiringi dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermutual.
- Tagalkan disipasi internet apa anggota 17+8 tidak mengendaki fungsi DPR.
- Komitmen publik 17+8 untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
- Melakukan upaya legal untuk seluruh anggota yang gugur, ralat, bunuh, mima sipil.
- Amat langka dan untuk menang PKK masa dan bidang hukum kontrak.
- Ura dialog dengan seluruh hukum untuk seluruh masyarakat dan berkolaborasi.

DALAM 1 TAHUN DEADLINE: 31/8/2026

- Bekukan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
- Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
- Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
- Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
- Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian
- TNI Kembali ke Barak, Tanpa Penguculan
- Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
- Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan

8 TUNTUTAN RAKYAT DALAM 1 TAHUN DEADLINE: 31/08/2026

- Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
Lakukan audit independen yang melibatkan publik. Tagalkan disipasi internet apa anggota DPR (tidak mentan korupsi) dan tegakkan KPI untuk melindungi. Tagalkan disipasi internet apa anggota DPR (tidak mentan korupsi) dan tegakkan KPI untuk melindungi.
- Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama media dalam tahun ini, dan DPR harus mempublikasikan laporan keuangan pertama media dalam tahun ini, dan DPR harus mempublikasikan laporan keuangan pertama media dalam tahun ini.
- Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
Perencanaan pajak harus melibatkan masyarakat sipil dan publik. Tagalkan disipasi internet apa anggota DPR (tidak mentan korupsi) dan tegakkan KPI untuk melindungi.
- Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
DPR harus segera mengesahkan UU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk mempublikasikan komitmen untuk membersihkan korupsi, dengan dukungan independensi KPI dan UU TPKOR.
- Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian
DPR harus mempublikasikan laporan keuangan pertama media dalam tahun ini, dan DPR harus mempublikasikan laporan keuangan pertama media dalam tahun ini.
- TNI Kembali ke Barak, Tanpa Penguculan
DPR harus segera mengesahkan UU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk mempublikasikan komitmen untuk membersihkan korupsi, dengan dukungan independensi KPI dan UU TPKOR.
- Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
DPR harus segera mengesahkan UU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk mempublikasikan komitmen untuk membersihkan korupsi, dengan dukungan independensi KPI dan UU TPKOR.
- Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
DPR harus segera mengesahkan UU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk mempublikasikan komitmen untuk membersihkan korupsi, dengan dukungan independensi KPI dan UU TPKOR.

17+8 Tuntutan Rakyat

17+8 tuntutan ini adalah rangkuman* atas berbagai tuntutan dan desakan yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir, di antaranya:

- Tuntutan 7 hari @jaaser @jeromepolin @cherymarella hasil rembukan jutaan suara rakyat di kolom komentar & Instagram Story.
- Desakan 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasi melalui website YLBIH
- Saran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHI)
- Pernyataan Sikap Rakan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI
- Pernyataan Sikap Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia
- Tuntutan Demo Buruh 28 Agustus 2025
- 10 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi & Keadilan oleh Reformasi Indonesia di Change.org yang sudah menerima lebih dari 40.000 dukungan

*Rangkuman ini berupaya menanggapi esensi dari berbagai sumber referensi di atas dan mungkin tidak mengikutsertakan seluruh detail secara utuh. Rangkuman ini juga tidak bermaksud mengesampingkan tuntutan-tuntutan lain yang mungkin juga beredar di waktu yang sama.

KAMI MENUNGGU. BUKTIKAN SUARA RAKYAT DIDENGAR.

Sumber: Instagram.com/@jeromepolin, diakses pada 28 februari 2026

pukul 12.43

Gambar 1.3 merupakan isi dari kampanye gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang menyuarakan aspirasinya secara lebih masif. Gerakan ini lahir dari pegiat media sosial yang merangkum berbagai tuntutan publik yang berserakan agar lebih jelas, terstruktur, dan memiliki daya dorong kolektif, dengan simbol 17 sebagai tuntutan jangka pendek dan 8 sebagai tuntutan jangka panjang menyangkut reformasi struktural.

Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat adalah rangkaian tuntutan publik yang viral di media sosial Indonesia yang muncul setelah demonstrasi besar pada akhir Agustus

2025 sebagai respons terhadap berbagai kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat dan masalah sosial lainnya. Gerakan ini dinamai “17+8” karena terdiri dari 17 tuntutan jangka pendek yang diharapkan dipenuhi dalam satu minggu dan 8 tuntutan jangka panjang yang diharapkan terealisasi dalam setahun berikutnya, dengan fokus pada transparansi, reformasi, dan keadilan. Daftar tuntutan ini disusun oleh sejumlah influencer dan aktivis media sosial seperti Jerome Polin, Salsa Erwina, Andovi da Lopez, Andhyta F. Utami, Fathia Izzati, dan Abigail Limuria sebagai rangkuman aspirasi yang beredar luas di platform seperti Instagram dan X. Gerakan ini menjadi simbol usaha untuk menyatukan suara rakyat serta menagih respons konkret dari pemerintah dan lembaga legislatif atas isu-isu penting yang diangkat oleh publik (Akashi n, 2025)

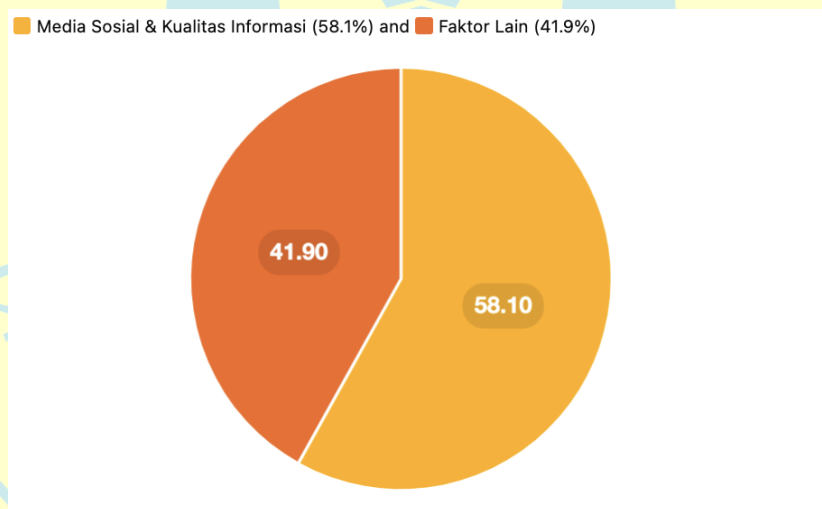
Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat merupakan rangkaian tuntutan yang viral di media sosial setelah gelombang demonstrasi pada Agustus 2025, yang mendesak enam pihak Presiden Prabowo Subianto, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ketua umum partai politik, Kepolisian RI, TNI, dan kementerian sektor ekonomi untuk memenuhi 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang, termasuk penarikan TNI dari tugas sipil, pembentukan tim investigasi independen untuk kasus kekerasan aparat, pembekuan kenaikan tunjangan DPR, serta reformasi struktural di parlemen dan sektor ekonomi demi transparansi dan kesejahteraan rakyat.

Tingginya jangkauan kampanye gerakan tersebut perlu diimbangi dengan kualitas informasi yang disampaikan, karena kualitas konten menjadi faktor penting dalam membentuk pemahaman, sikap, serta tingkat kebutuhan informasi mahasiswa.

Penelitian ini juga menyoroti pengemasan, penyusunan, dan penyampaian informasi mengenai kampanye '17+8 Tuntutan Rakyat' kepada publik, di samping mempertimbangkan faktor intensitas penggunaan media. Uraian pada bagian selanjutnya akan berfokus pada konsep kualitas informasi sebagai variabel yang berperan dalam memengaruhi kebutuhan informasi politik mahasiswa.

Gambar 1. 4.

Data Kualitas Informasi Politik



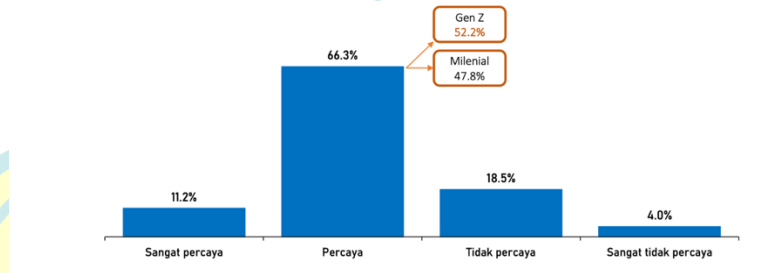
Sumber: Mu'arifah dan Renny (2024)

Berdasarkan hasil penelitian Mu'arifah dan Renny (2024), diperoleh temuan bahwa media sosial Instagram @pinterpolitik dan kualitas informasi yang disajikan memiliki pengaruh sebesar 58,1% terhadap pemenuhan kebutuhan informasi politik Generasi Z. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah variasi dalam kebutuhan informasi politik responden dapat dijelaskan oleh tingkat penggunaan media sosial tersebut serta kualitas konten informasi yang diterima.

Tingginya intensitas terpaan media sosial dan semakin baik kualitas informasi yang disajikan ditinjau dari aspek akurasi, relevansi, dan kejelasan maka semakin tinggi pula tingkat pemenuhan kebutuhan informasi politik Generasi Z. Sebesar 41,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian, seperti media massa lainnya, lingkungan sosial, pendidikan, atau sumber informasi alternatif. Temuan ini memperkuat asumsi teori *Uses and Gratifications* yang menyatakan bahwa audiens secara aktif memilih media yang mampu memenuhi kebutuhan informasinya, termasuk dalam konteks informasi politik.

Urgensi penelitian ini menjadi penting karena meningkatnya arus informasi politik di media sosial tidak selalu diikuti dengan meningkatnya pemahaman atau kebutuhan informasi yang mendalam di kalangan mahasiswa. Viralitas konten politik, khususnya yang disampaikan oleh figur publik di Instagram, berpotensi menciptakan paparan yang tinggi, namun belum tentu mendorong audiens untuk benar-benar mencari, memahami, dan mengkritisi isu secara lebih komprehensif.

Kampanye “17+8 Tuntutan Rakyat”, unggahan yang dipublikasikan melalui akun tersebut berpotensi membentuk persepsi serta memenuhi kebutuhan informasi politik mahasiswa, terutama mahasiswa Ilmu Komunikasi yang secara akademik memiliki kedekatan dengan isu media dan politik. Penggunaan media @jeromepolin sebagai informasi politik perlu diketahui bagaimana kualitas informasi yang disampaikan dalam kampanye tersebut berpengaruh terhadap kebutuhan informasi politik mahasiswa, guna memahami dinamika baru dalam proses pencarian dan pemenuhan informasi politik di era digital.

Gambar 1. 5.**Data Partisipasi Politik**

Sumber : Katadata.co.id, diakses pada 2 Oktober 2025 pukul 18.50.

Mahasiswa yang tercatat pada tahun ini adalah Generasi Z merupakan kelompok yang lahir pada rentang tahun 1998 hingga 2009 (Arum et al., 2023). Pada data “kebutuhan informasi politik dapat berkontribusi pada perumusan kebijakan publik” menunjukkan bahwa di antara kelompok yang percaya, Gen Z (52,2%) sedikit lebih dominan dibanding Milenial (47,8%). Ini mengindikasikan bahwa Gen Z cenderung lebih optimis terhadap efektivitas politik anak muda, terutama dalam konteks gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat” (Katadata, 2023).

Optimisme ini bisa dikaitkan dengan karakter Gen Z yang lebih akrab dengan media sosial dan terbiasa menggunakan platform digital sebagai sarana berekspresi, membangun opini, dan menuntut perubahan (Judijanto et al., 2024). Artinya, penggunaan media sosial memiliki daya tarik lebih kuat pada Gen Z dibanding Milenial, sehingga mereka lebih mudah diyakinkan bahwa politik berbasis digital dapat memberi pengaruh nyata terhadap kebijakan publik.

Peneliti memilih mahasiswa PTN Ilmu Komunikasi di Jakarta sebagai subjek penelitian karena kelompok ini dinilai mewakili generasi muda yang aktif, kritis, dan sangat dekat dengan dunia media sosial. Mahasiswa Ilmu Komunikasi memiliki pengetahuan dasar tentang proses komunikasi massa, strategi digital, serta bagaimana media membentuk opini publik (Meilinda, 2018).

Permasalahan utama berdasarkan yang telah dipaparkan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengaruh Penggunaan Media @Jeromepolin Dan Kualitas Informasi Kampanye “17+8 Tuntutan Rakyat” Terhadap Kebutuhan Informasi Politik Mahasiswa Ilmu Komunikasi Ptn Di Jakarta (Unggahan di Instagram @jeromepolin “17+8 Tuntutan Rakyat” 31 Agustus 2025). Fenomena ini menarik untuk diteliti karena Belum diketahui secara empiris apakah dan sejauh mana penggunaan media serta kualitas informasi dari kampanye “17+8 Tuntutan Rakyat” di Instagram benar-benar berpengaruh terhadap kebutuhan informasi politik mahasiswa Ilmu Komunikasi PTN di Jakarta. Meskipun kampanye tersebut viral dan banyak diakses, tingginya paparan belum tentu mendorong mahasiswa untuk mencari dan memahami informasi politik secara lebih mendalam. Selain itu, kualitas informasi yang dipersepsikan juga dapat menentukan apakah konten tersebut memicu untuk mengetahui isu lebih lanjut. Oleh karena itu, hubungan antara terpaan media, kualitas informasi, dan kebutuhan informasi politik perlu diuji secara empiris melalui penelitian ini.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirangkum beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaruh penggunaan media Instagram pada mahasiswa Ilmu Komunikasi PTN di Jakarta terhadap unggahan kampanye “17+8 Tuntutan Rakyat” di Instagram @jeromepolin belum terpetakan secara jelas.
2. Pengaruh mahasiswa terhadap kualitas informasi kampanye “17+8 Tuntutan Rakyat” di Instagram @jeromepolin, belum diketahui secara terukur dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan informasi politik.
3. Tingginya penggunaan media terhadap konten kampanye di media sosial belum tentu mencerminkan adanya dorongan untuk mencari dan memahami informasi politik secara lebih mendalam, sehingga perlu diuji apakah terpaan tersebut benar-benar memicu kebutuhan informasi politik atau hanya sebatas konsumsi informasi sesaat.
4. Pengaruh Penggunaan Media (X1) secara parsial terhadap kebutuhan informasi politik mahasiswa (Y) belum memiliki bukti empiris yang teruji dalam konteks kampanye “17+8 Tuntutan Rakyat”.
5. Pengaruh Penggunaan Media (X1) dan kualitas informasi (X2) secara simultan terhadap kebutuhan informasi politik (Y) pada mahasiswa Ilmu Komunikasi PTN di Jakarta juga belum diketahui, sehingga diperlukan pengujian kuantitatif untuk melihat besaran dan signifikansi pengaruhnya.

1.3. Rumusan Masalah

Latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat mengakses informasi, termasuk dalam ranah politik. Berdasarkan hasil riset Polling Indonesia bersama Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tercatat bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8% dari total populasi. Angka tersebut menunjukkan bahwa Masyarakat semakin terhubung dengan internet dan tidak dapat dilepaskan dari paparan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial kini menjadi ruang interaksi publik yang berperan penting dalam penyebaran informasi politik, pembentukan opini, dan dukungan terhadap suatu isu tertentu

Fenomena tersebut tampak jelas pada munculnya gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang menjadi viral di berbagai platform digital seperti Instagram, TikTok, dan X (Twitter). Gerakan ini muncul sebagai ekspresi keresahan masyarakat terhadap isu-isu politik, sosial, dan ekonomi, dengan 17 tuntutan. Laporan berita yang beredar, gerakan ini digerakkan oleh lebih dari 211 organisasi masyarakat sipil serta didukung oleh influencer dan tokoh publik yang ikut menyuarakan aspirasi masyarakat melalui media sosial.

Masifnya penyebaran informasi tersebut, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana tingkat penggunaan media dan kualitas informasi gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat” benar-benar memengaruhi cara mahasiswa kebutuhan informasi politik. Apakah mereka memiliki kesadaran politik yang terbentuk melalui proses informasi

yang kritis, atau justru hanya mengikuti arus viral yang berkembang di media sosial tanpa pemahaman mendalam terhadap substansi tuntutan tersebut? Hal ini menjadi penting mengingat hasil survei Databooks (2024) menunjukkan bahwa Instagram menjadi platform utama untuk memperoleh informasi politik bagi anak muda dengan persentase 66,2%, disusul oleh YouTube sebesar 40,8%. Data tersebut memperkuat bahwa generasi muda, khususnya mahasiswa, memiliki ketergantungan tinggi terhadap media sosial dalam membentuk pandangan politiknya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh penggunaan media terhadap kebutuhan informasi politik mahasiswa Ilmu Komunikasi PTN di Jakarta pada unggahan “17+8 Tuntutan Rakyat” di Instagram @jeromepolin?
2. Apakah terdapat pengaruh kualitas informasi kampanye gerakan “17+8 tuntutan rakyat” terhadap kebutuhan informasi politik mahasiswa Ilmu Komunikasi PTN di Jakarta pada unggahan tersebut?
3. Apakah terdapat pengaruh penggunaan media @jeromepolin (X1) dan Kualitas Informasi kampanye gerakan “17+8 tuntutan rakyat” (X2), baik secara parsial maupun simultan, terhadap kebutuhan informasi politik mahasiswa Ilmu Komunikasi PTN di Jakarta?

1.4. Tujuan Penelitian

Penjelasan dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana penggunaan media dan kualitas informasi media sosial berperan dalam membentuk kebutuhan informasi politik pada mahasiswa. Gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat” menjadi fenomena menarik di era digital karena menunjukkan bagaimana media sosial dapat menjadi alat penyebaran aspirasi dan mobilisasi opini publik secara cepat dan masif.

Pemahaman yang lebih masih diperlukan dalam mengetahui sejauh mana tingkat keterpaparan media dan kualitas informasi dari gerakan tersebut benar-benar memengaruhi cara mahasiswa menilai dan mengevaluasi isu-isu kebijakan politik. Mahasiswa Ilmu Komunikasi dipilih sebagai subjek penelitian karena dianggap memiliki pengetahuan dasar tentang komunikasi massa, serta peran media dalam membentuk opini publik. Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan media konten gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat” di Instagram @jeromepolin terhadap kebutuhan informasi politik mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi PTN di Jakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas informasi gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat” di Instagram @jeromepolin terhadap kebutuhan informasi politik mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi PTN di Jakarta.

3. Untuk mengetahui pengaruh Penggunaan Media (X1) dan kualitas informasi gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat” di Instagram @jeromepolin (X2), baik secara parsial maupun simultan, terhadap kebutuhan informasi politik mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi PTN di Jakarta (Y).

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan literatur dalam bidang ilmu komunikasi, khususnya mengenai pengaruh penggunaan media dan kualitas informasi media sosial terhadap kebutuhan informasi politik. Hasilnya juga dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pengelola media sosial, aktivis digital, maupun organisasi masyarakat dalam merancang strategi kualitas informasi politik atau sosial yang lebih efektif melalui media digital. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa dan masyarakat umum untuk lebih kritis dalam menerima serta menanggapi informasi politik yang tersebar di media sosial. Penelitian ini dapat membantu meningkatkan literasi digital dan kesadaran politik mahasiswa di era media baru.